



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

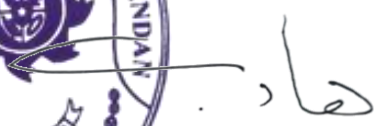
Jln. Anwar No. 5 Kel. Pangkallalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung 33412
Telp. (0719) 21309 www.pa-tanjungpandan.go.id, pa.tanjungpandan.go.id@gmail.com

Nomor : 179/SEK.PA.W28-A3/PL1.2.7/VII/2026 Tanjungpandan, 21 Juli 2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Dokumen
Perihal : Penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semester I Tahun 2026

Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
c.q. Kepala Biro Perlengkapan
di Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 301/BUA.4/PL1.2.7/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026 tentang Penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2025 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pengelolaan Barang Milik Negara, bersama ini kami sampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.


Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Tanjungpandan

Hadi Siswanto

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung

BAGIAN ANGGARAN 005.01



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN ANGGARAN 2026

Jl. Anwar N0. 5 Tanjungpandan

Telp. 071921309 Fax. 07199223119

Belitung - Bangka Belitung 33412

e-mail : pa.tanjungpandan.go.id@gmail.com



**BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN SEMESTER I TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup aset-aset yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BMN merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, Pengadilan Agama Tanjungpandan sebagai salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yaitu Badan Urusan Administrasi untuk DIPA 01 melalui Biro Perlengkapan. LBKP Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara untuk periode tahunan.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK



Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Pengadilan ... Semester I Tahun Anggaran 2026, kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Tanjungpandan. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Tanjungpandan, 21 Juli 2026

Sekretaris Pengadilan Agama Tanjungpandan
selaku

Kuasa Pengguna Barang



HADI SISWANTO



DAFTAR ISI

DATA UTAMA

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca 30 Juni 2026
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan Barang Intrakomptabel
6. Laporan Barang Ekstrakomptabel
7. Laporan Barang Gabungan
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. Laporan Aset Tak Berwujud
10. Laporan Barang Bersejarah
11. Laporan Barang Rusak Berat
12. Laporan Barang Hilang
13. Laporan Barang BPYBDS
14. Laporan Barang Hibah DK/TP
15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel
16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud
18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)
19. Laporan PNPB (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)
20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara
21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara

DATA TAMBAHAN

1. Neraca Percobaan Berbasis AkruaI dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja (2 Dokumen Cetak)
2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya
3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)
4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan
5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN



DAFTAR LAMPIRAN

1. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode Persediaan (jika ada)**
2. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode BMN (jika ada)**
3. **Penjelasan BMN: Jalan dan Jembatan (jika ada)**
4. **Penjelasan BMN: Irigasi (jika ada)**
5. **Penjelasan BMN: Jaringan (jika ada)**
6. **Penjelasan BMN: Aset Tetap Renovasi (jika ada)**
7. **Penjelasan BMN: Aset Tak Berwujud Lainnya (jika ada)**
8. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Persediaan (jika ada)**
9. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (jika ada)**
10. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi (jika ada)**
11. **Penjelasan BMN: Koreksi atas Reklas Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (jika ada)**
12. **Penjelasan BMN: Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
13. **Penjelasan BMN: Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
14. **Penjelasan BMN: Beban Pelepasan Aset (jika ada)**
15. **Penjelasan BMN: Beban Persediaan Rusak/Usang (jika ada)**



OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA (NAMA SATUAN KERJA) SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2026 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan selama Tahun Anggaran 2026.

Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBP *Semester I* ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan LBKP *Semester I* ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP *Semester I* ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026. Dalam penyusunannya, LBP *Semester I* ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MyIntress milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.

Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:

1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak



Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);

2. Nilai Neraca per 30 Juni 2026 adalah Rp11.256.295.699,00 yang berasal dari nilai saldo awal 1 Januari 2026 sebesar Rp11.346.629.113,00 dan mutasi tambah kurang sebesar Rp90.333.414,00;
3. Saldo persediaan per 30 Juni 2026 adalah Rp19.676.360,00 yang berasal dari nilai saldo awal persediaan per 1 Januari 2026 sebesar Rp16.985.058,00 dan mutasi tambah kurang sebesar Rp2.691.302,00;
4. Mutasi tambah aset terjadi karena: (1) realisasi belanja modal, terdiri atas pembelian, renovasi, dan pembangunan bangunan gedung baru; (2) hibah masuk BMN; (3) Transfer Masuk BMN; (4) Koreksi Nilai Bertambah (5) Perolehan Lainnya dan lain sebagainya. Total mutasi tambah aset adalah sebesar Rp24.085.996,00;
5. Mutasi kurang aset terjadi karena: (1) pemindahtanganan BMN; (2) hibah keluar BMN; (3) transfer keluar; (4) pemusnahan BMN; (5) Koreksi Nilai Berkurang (6) penghapusan BMN dan lain sebagainya. Total mutasi kurang aset adalah sebesar Rp2.645.998,00;
6. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan
7. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan Status Penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke Pengelola; 2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.

LBKP *Semester I* ini merupakan landasan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Tahun 2026 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang



Pengguna Mahkamah Agung Semester I Tahun Anggaran 2026. Penyusunan LBKP *Semester I* yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP *Semester I* ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP *Semester I* secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Agama Tanjungpandan telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Agama Tanjungpandan, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Agama Tanjungpandan dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan



Keuangan Pemerintah;

- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;



- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2026 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Agama Tanjungpandan selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor



181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.



Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara** sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2026 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara**. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2026, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Agama Tanjungpandan. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar**.



Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Agama Tanjungpandan, dalam LBKP Semester I Tahun Anggaran 2026 ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 30 Juni 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2026 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka



Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2026 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor ... Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada



prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 ini adalah sebesar Rp14.953.484.059,00 (*empat belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima puluh sembilan rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp14.932.044.061,00 (*empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat puluh empat ribu enam puluh satu rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2026 sebesar Rp21.439.998,00 (*dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp24.085.996,00 (*dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp2.645.998,00 (*dua juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2026.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 30 Juni 2026
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2026
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;



9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN;
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2026 menurut Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah sebesar Rp14.932.044.061,00 (*empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat puluh empat ribu enam puluh satu rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp 14.908.990.041,00 (*empat belas milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat puluh satu rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 23.054.020,00 (*dua puluh tiga juta lima puluh empat ribu dua puluh rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 Semester I

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 19.676.360,00 (*sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:



Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	13.142.608,00	2.432.842,00	15.575.450,00
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3.842.450,00	258.460,00	4.100.910,00

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp0,00 (*nol rupiah*)

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp8.951.568.000,00 (*delapan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 7.367 m² dengan nilai sebesar 8.951.568.000,00 (*delapan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Pembelian	0,00
Hibah Masuk	0,00

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah

Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	0,00
Reklasifikasi Keluar	0,00

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah



Dari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*)

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	7.367	8.951.568.000,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Tabel 4. Kondisi Tanah

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 237 buah dengan nilai sebesar Rp2.081.816.787,00 (*dua milyar delapan puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 220 buah dengan nilai sebesar Rp2.060.376.789,00 (*dua miliar enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*), mutasi tambah sebanyak 21 buah dengan nilai sebesar Rp24.085.996,00 (*dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar Rp2.645.998,00 (*dua juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat besar di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.



b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp510.332.000,00 (*lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp510.332.000,00 (*lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Angkutan

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Angkutan

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, Saldo Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 2 buah dengan nilai sebesar Rp2.210.000,00 (*dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*).



Rincian data Alat Angkutan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	1	311.000.000,00
Rusak Ringan	11	199.332.000,00
Rusak Berat	2	2.210.000,00

Tabel 7. Kondisi Alat Angkutan

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

d. Alat Pertanian (3.04)

Saldo Alat Pertanian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Pertanian di atas, Saldo Alat Pertanian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 153 buah dengan nilai sebesar Rp628.318.797,00 (*enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 136 buah dengan nilai sebesar Rp 606.878.799,00 (*enam ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), mutasi tambah sebanyak 21 buah dengan



nilai sebesar Rp24.085.996,00 (*dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar Rp2.645.998,00 (*dua juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Kantor	2.645.998,00	0,00
Alat Rumah Tangga	21.439.998,00	0,00

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Kantor	0,00	0,00
Alat Rumah Tangga	2.645.998,00	0,00

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 552 buah dengan nilai sebesar Rp393.655.887,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

Rincian data Alat Angkutan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	153	628.318.797,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	552	393.655.887,00

Tabel 10. Kondisi Alat Kantor dan Rumah Tangga



f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp116.620.000,00 (*seratus enam belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp116.620.000,00 (*seratus enam belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Alat Angkutan

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Alat Angkutan

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 27 buah dengan nilai sebesar Rp64.472.816,00 (*enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah*).



Rincian data Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	11	116.620.000,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	27	64.472.816,00

Tabel 13. Kondisi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

g. Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

h. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Laboratorium dan Kesehatan di atas, Saldo Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

i. Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah



sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Persenjataan dan Kesehatan di atas, Saldo Alat Persenjataan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

j. Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 61 buah dengan nilai sebesar Rp826.545.990,00 (*delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 61 buah dengan nilai sebesar Rp826.545.990,00 (*delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00

Tabel 14. Rincian Mutasi Tambah Komputer

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00

Tabel 15. Rincian Mutasi Kurang Komputer

Dari jumlah Komputer di atas, Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 73 buah dengan nilai sebesar Rp520.928.450,00 (*lima ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah*)



Rincian data Komputer berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	61	826.545.990,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	73	520.928.450,00

Tabel 16. Kondisi Komputer

Dari jumlah Komputer di atas, Saldo Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

k. Alat Eksplorasi (3.11)

Saldo Alat Eksplorasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Eksplorasi dan Kesehatan di atas, Saldo Alat Eksplorasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

l. Alat Pengeboran (3.12)

Saldo Alat Pengeboran pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Pengeboran dan Kesehatan di atas, Saldo Alat Pengeboran yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)

Saldo Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut



terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dan Kesehatan di atas, Saldo Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

n. Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Saldo Alat Bantu Eksplorasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Bantu Eksplorasi di atas, Saldo Alat Bantu Eksplorasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

o. Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, Saldo Alat Keselamatan Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

p. Alat Peraga (3.16)

Saldo Alat Peraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Peraga di atas, Saldo Alat Peraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.



q. Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses/Produksi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, Saldo Peralatan Proses/Produksi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

r. Rambu-Rambu (3.18)

Saldo Rambu-Rambu pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Rambu-Rambu di atas, Saldo Rambu-Rambu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

s. Peralatan Olahraga (3.19)

Saldo Peralatan Olahraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Peralatan Olahraga di atas, Saldo Peralatan Olahraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 buah dengan nilai sebesar Rp145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Tanjungpandan Periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp1.923.990.939,00 (*satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan



dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp1.915.438.829,00 (*satu milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*) dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp8.552.110,00 (*delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah*).

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp19.999.998,00 (*sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp2.947.715.000,00 (*dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp2.947.715.000,00 (*dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung (401)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp2.947.715.000,00 (*dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp2.947.715.000,00 (*dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp Rp0,00 (*nol rupiah*).



Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	0	0,00
Rusak Ringan	936	2.947.715.000,00
Rusak Berat	0	0,00

Tabel 19. Kondisi Bangunan Gedung



b. Monumen (402)

Saldo Monumen pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Monumen di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Kelompok barang Monumen yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

c. Bangunan Menara (403)

Saldo Bangunan Menara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Bangunan Menara di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Kelompok barang Monumen yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

d. Tugu Titik Kontrol/Pasti (404)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).



Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Kelompok barang Monumen yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Tanjungpandan Periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp813.977.720,00 (*delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp813.977.720,00 (*delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*). dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Monitoring Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah Jalan dan Jembatan, 0 buah Irigasi, serta 0 buah Jaringan dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah (jalan dan jembatan/irigasi/jaringan) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah (jalan dan jembatan/irigasi/jaringan) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Tanjungpandan Periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta



Jaringan intrakomptabel sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Monitoring Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Realisasi belanja modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp927.109,00 (*sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp927.109,00 (*sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp927.109,00 (*sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp927.109,00 (*sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga (6.02)

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).



dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga di atas, Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

c. Tanaman (6.05)

Saldo Tanaman pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Tanaman di atas, Saldo Tanaman yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

d. Aset Tetap dalam Renovasi (6.07)

Saldo Aset Tetap dalam Renovasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah aset tetap dalam renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Kelompok barang aset tetap dalam renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Tanjungpandan Periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp927.109,00 (*sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari akumulasi



penyusutan Bahan Perpustakaan Tercetak Intrakomptabel sebesar Rp. 927.109,00 (*sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah*) dan akumulasi penyusutan Bahan Perpustakaan Tercetak ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Monitoring Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar 0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

8. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pengadilan Agama Tanjungpandan tidak memiliki BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

b. Aset Tak Berwujud

Pengadilan Agama Tanjungpandan tidak memiliki BMN berupa Aset Tak Berwujud.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran



2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 658 buah dengan nilai sebesar Rp971.457.163,00 (*sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 658 buah dengan nilai sebesar Rp971.457.163,00 (*sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,00	0,00
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	0,00	0,00

Tabel 20. Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Mutasi Kurang Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	0,00	0,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0,00	0,00

Tabel 21. Rincian Mutasi Kurang Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan



Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	...	...
2. Peralatan dan Mesin	960.308.153,00	11.149.010,00
3. Gedung dan Bangunan	...	...
4. Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan	...	...
5. Aset Tetap Lainnya ..dst	...	...
Jumlah	960.308.153,00	11.149.010,00

Tabel 22. BMN yang Telah Dihentikan Penggunaannya per 30 Juni 2026

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp970.839.163,00 (*sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan eibu seratus enam puluh tiga rupiah*) sehingga didapat Nilai Netto dari Akun Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 30 Juni 2026 yang sebelumnya senilai Rp971.457.163,00 (*sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah*) menjadi Rp618.000,00 (*enam ratus delapan belas ribu rupiah*).

d. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tak Berwujud (ATB) yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).



9. Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit. atau Pengadilan Agama Tanjungpandan tidak memiliki BMN berupa Aset Bersejarah.

V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 30 Juni 2026

A. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp14.929.035.343,00 (*empat belas milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	2.691.302	-	-	-	2.691.302	-
	Sub Jumlah (1)	2.691.302				2.691.302	
II	Aset Tetap						
1	Tanah	8.951.568.000	-	0	-	8.951.568.000	-
2	Peralatan dan Mesin	2.065.825.779	-	15.991.008	-	2.081.816.787	-
3	Gedung dan Bangunan	2.947.715.000	-	0	-	2.947.715.000	-
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	-	0	-	0	-
5	Aset Tetap Lainnya	927.109	-	0	-	927.109	-
6	KDP	0	-	0	-	0	-
	Sub Jumlah (2)	13.966.035.888					
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	-	0	-	0	-
2	Aset Tak Berwujud	0	-	0	-	0	-
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	960.308.153	-	11.149.010	-	971.457.163	-
	Sub Jumlah (3)	960.308.153					
	Total	14.929.035.343	-	27.140.018	-	14.956.175.361	-



Tabel 23. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	(0)	-	(0)	-	(0)	-
	Sub Jumlah (1)	(0)	-	(0)	-	(0)	-
II	Aset Tetap						
1	Tanah	(0)	-	(0)	-	(0)	-
2	Peralatan dan Mesin	(1.915.438.829)	-	(8.552.110)	-	(1.923.990.939)	-
3	Gedung dan Bangunan	(813.977.720)	-	(0)	-	(813.977.720)	-
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	(0)	-	(0)	-	(0)	-
5	Aset Tetap Lainnya	(0)	-	(0)	-	(0)	-
6	KDP	(0)	-	(0)	-	(0)	-
	Sub Jumlah (2)	(2.729.416.549)	-	(8.552.110)	-	(2.737.968.659)	-
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(0)	-	(0)	-	(0)	-
2	Aset Tak Berwujud	(0)	-	(0)	-	(0)	-
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	(960.308.153)	-	(11.149.010)	-	(971.457.163)	-
	Sub Jumlah (3)	(960.308.153)	-	(11.149.010)	-	(971.457.163)	-
	Total	(3.689.724.702)	-	(19.701.120)	-	(3.709.425.822)	-

Tabel 24. Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Per Akun Neraca

B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 per akun neraca adalah sebagai berikut:



No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Lancar	19.676.360	19.676.360	0
1	Persediaan	19.676.360	19.676.360	0
II	Aset Tetap	11.236.619.339	11.236.619.339	0
1	Tanah	8.951.568.000	8.951.568.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.065.825.779	2.065.825.779	0
3	Gedung dan Bangunan	2.947.715.000	2.947.715.000	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	927.109	927.109	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.729.416.549)	(2.729.416.549)	0
III	Aset Lainnya	0	0	0
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-Lain *)	960.308.153	960.308.153	0
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(960.308.153)	(960.308.153)	0
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		11.256.295.699	11.256.295.699	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 25. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir Semester I, dapat disajikan sebagai berikut:



No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan Semester I 2022	14.493.790.521	-	-
2	Laporan Semester I 2023	14.604.355.521	110.565.000	0,76%
3	Laporan Semester I 2024	14.751.355.521	147.000.000	0,99%
4	Laporan Semester I 2025	14.889.534.721	138.179.200	0,93%
5	Laporan Semester I 2026	14.953.484.059	63.949.338	0,43%

Tabel 26. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Agama Tanjungpandan per Periode
Laporan Semester I

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	-	-	3	8.951.568.000
2	Alat Angkutan Bermotor	-	-	14	512.542.000
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	17	21.439.998	730	1.171.817.512
4	Peralatan dan Mesin TIK	-	-	134	1.347.474.440
5	Alat Berat	-	-	-	-
6	Bangunan Gedung	-	-	1	2.750.646.000
7	Rumah Negara	-	-	1	197,069,000
8	Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
9	Instalasi dan Jaringan	-	-	-	-
10	Bangunan Air dan Irigasi	-	-	-	-
11	Aset Tetap lainnya	-	-	12	927.179
12	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
JUMLAH		17	21.439.998	895	14.932.044.061

Tabel 27. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Agama Tanjungpandan Tahun 2026

b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Agama Tanjungpandan selama periode



Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Pemusnahan	Penghapusan	Alih Fungsi	Alih Status	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	1
	a. dikembalikan	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang	1	0	0	0	0	0	0	1
6	Telah diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang	1	0	0	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 28. Pengelolaan BMN pada Pengadilan Agama Tanjungpandan Tahun 2026



c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tabel 29. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Agama Tanjungpandan Tahun 2026

d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar Barang Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) sebagaimana rincian pada Daftar BMN Rusak Berat yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

2. Daftar Barang Hilang

Nilai BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Tanjungpandan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) sebagaimana rincian pada Daftar Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

e. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

1. BMN dalam sengketa/perkara/bermasalah

-NIHIL-

2. Tanah Belum Bersertipikat

-NIHIL-

f. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Pengadilan Agama Tanjungpandan, langkah-langkah strategis yang



perlu dilakukan antara lain sebagai berikut: -NIHIL-

g. Pengungkapan Penting Lainnya

-NIHIL-

h. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2026 tanggal 19 Mei 2026 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Agama Tanjungpandan telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang (Awal)	NUP	Nama Barang (Akhir)	NUP
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	2
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Kelas IB	1

Tabel 30. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan pada Pengadilan Agama Tanjungpandan

i. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2025 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025, **Tidak Terdapat** temuan BPK pada Pengadilan Agama Tanjungpandan terkait Aset Tetap dan Persediaan.



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Agama Tanjungpandan telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan selama tahun 2026.

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Sampai dengan periode Juni 2026, Pengadilan Agama Tanjungpandan belum mengajukan RKBMN karena pengajuan RKBMN untuk tahun 2028 dilaksanakan pada bulan Agustus 2026.

Pengadilan Agama Tanjungpandan tidak mengajukan usulan RP33BMN untuk tahun 2027.



b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 30 Juni 2026 adalah sebanyak 895 unit dengan nilai sebesar Rp14.932.044.061,00. Namun, masih terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya sebanyak 17 unit dengan nilai sebesar Rp21.439.998,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BMN	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp) (C)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp) (D)	Kuantitas (A+B)	Nilai (C+D)
Tanah	-	-	3	8.951.568.000	4	8.951.568.000
Alat Angkutan Bermotor	-	-	14	512.542.000	14	512.542.000
Peralatan dan Mesin Non TIK	17	21.439.998	730	1.171.817.512	747	1.193.257.510
Peralatan dan Mesin TIK	-	-	134	1.347.474.440	134	1.347.474.440
Alat Berat	-	-	-	-	-	-
Bangunan Gedung	-	-	1	2.750.646.000	1	2.750.646.000
Rumah Negara	-	-	1	197,069,000	1	197,069,000
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-	-
Instalasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap lainnya	-	-	12	927.179	12	927.179
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
Total	17	21.439.998	895	14.932.044.061	912	14.953.484.059

c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Agama Tanjungpandan telah melakukan permohonan terkait Penetapan Status Penggunaan (PSP), ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

Pengadilan Agama Tanjungpandan per 30 Juni 2026 masih terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang untuk menerbitkan persetujuan/keputusan (PSP) dengan nilai sebesar Rp21.439.998, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL26071514530743146	PSP	21.439.998



2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Tanjungpandan per 30 Juni 2026 masih terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk permohonan pengelolaan BMN dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL26071514530743146	PSP	21.439.998

3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang
Selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, Pengadilan Agama Tanjungpandan tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang yang telah diterbitkan persetujuan/keputusannya.
4. Selesai Serah Terima
Selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, Pengadilan Agama Tanjungpandan tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengguna Barang yang telah diterbitkan persetujuan/keputusannya.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Jln. Anwar No. 5 Kel. Pangkallalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung 33412
Telp. (0719) 21309 www.pa-tanjungpandan.go.id, pa.tanjungpandan.go.id@gmail.com

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN
NOMOR: 153/SEK.PA.W28-A3/PL1.2.6/VI/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Pengadilan Agama Tanjungpandan Jl. Anwar No. 5 Tanjungpandan, Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Ahmad Sobirin, S.T.
NIP : 199705022025061013
Jabatan : Petugas UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk selanjutnya disebut **pihak pertama**.
- II. Nama : Desi Amalia, S.E.
NIP : 199612252022032010
Jabatan : Petugas UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk selanjutnya disebut **pihak kedua**.

menyatakan bahwa telah melakukan rekonsiliasi data barang milik negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan cara membandingkan data BMN pada laporan barang kuasa pengguna yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan Juni tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut:

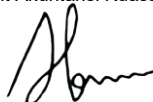
I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	NILAI BMN PERIODE 30 JUNI 2026		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
A. Aset Lancar		16.985.058	2.691.302	19.676.360
A.1 Persediaan		16.985.058	2.691.302	19.676.360
B. ASET TETAP		11.329.026.055	(92.406.716)	11.236.619.339
B.1 Tanah		8.951.568.000	-	8.951.568.000
B.2 Peralatan dan Mesin		2.048.471.779	17.354.000	2.065.825.779
B.3 Gedung dan Bangunan		2.947.715.000	-	2.947.715.000
B.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-
B.5 Aset Tetap Lainnya		927.109	-	927.109
B.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-	-
B.7 Akumulasi Penyusutan		(2.619.655.833)	(109.760.716)	(2.729.416.549)
C. ASET LAINNYA		618.000	(618.000)	-
C.1 Aset Tidak Berwujud		-	-	-
C.2 Aset Lain-lain		960.308.153	-	960.308.153
C.3 Akumulasi Penyusutan		(959.690.153)	(618.000)	(960.308.153)
D. SUB JUMLAH (A+B+C)		11.346.629.113	(90.333.414)	11.256.295.699
E. Ekstrakomptabel		4.922.000	2.516.898	7.438.898
E.1 Ekstrakomptabel		23.054.020	4.085.998	27.140.018
E.2 Akumulasi Penyusutan		(18.132.020)	(1.569.100)	(19.701.120)
F. TOTAL (D+E)		11.351.551.113	(87.816.516)	11.263.734.597

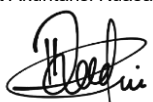
- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam lampiran berita acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk bahan penyusunan laporan BMN dan LKPP periode bulan Juni tahun 2026 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

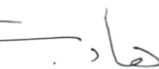
Petugas UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang)


Ahmad Sobirin, S.T.
NIP.199705022025061013

Petugas UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)

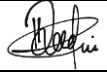

Desi Amalia, S.E.
NIP.199612252022032010

Mengetahui,
Sekretaris Pengadilan Agama Tanjungpandan
Selaku Kuasa Pengguna Barang


Hadi Siswanto, S.Kom., M.H.
NIP. 198003292009121001

**LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL**

I. TANDA TANGAN	
	
Keuangan	Barang

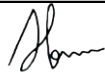
II. PERIODE			
Jun	30	20	26

III. UNIT ORGANISASI																					
1.	Kode	0	0	5	0	1	3	0	0	0	4	0	2	3	1	8	0	0	0	K	D
2.	Nama	Pengadilan Agama Tanjungpandan Jl. Anwar No. 5 Tanjungpandan Telp. 071921309 Fax. 07199223119 Belitung - Bangka Belitung 33412																			

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	SAK	SIMAK - BMN	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	16.985.058	16.985.058	16.985.058
	A.1 Persediaan	16.985.058	16.985.058	16.985.058
B	ASET TETAP	11.329.026.055	11.329.026.055	11.329.026.055
	B.1 Tanah	8.951.568.000	8.951.568.000	8.951.568.000
	B.2 Peralatan dan Mesin	2.048.471.779	2.048.471.779	2.048.471.779
	B.3 Gedung dan Bangunan	2.947.715.000	2.947.715.000	2.947.715.000
	B.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
	B.5 Aset Tetap Lainnya	927.109	927.109	927.109
	B.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	B.7 Akumulasi Penyusutan	(2.619.655.833)	(2.619.655.833)	(2.619.655.833)
C	ASET LAINNYA	618.000	618.000	618.000
	C.1 Aset Tidak Berwujud	-	-	-
	C.2 Aset Lain-lain	960.308.153	960.308.153	960.308.153
	C.3 Akumulasi Penyusutan	(959.690.153)	(959.690.153)	(959.690.153)
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	11.346.629.113	11.346.629.113	11.346.629.113
E	Ekstrakomptabel	4.922.000	4.922.000	4.922.000
	E.1 Ekstrakomptabel	23.054.020	21.975.160	21.975.160
	E.2 Akumulasi Penyusutan	(18.132.020)	(16.592.660)	(16.592.660)
F	TOTAL (D+E)	11.351.551.113	11.351.551.113	11.351.551.113

V. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(05)
A	ASET LANCAR	16.985.058	-	-	16.985.058
	A.1 Persediaan	16.985.058	-	-	16.985.058
B	ASET TETAP	11.329.026.055	-	-	11.329.026.055
	B.1 Tanah	8.951.568.000	-	-	8.951.568.000
	B.2 Peralatan dan Mesin	2.048.471.779	-	-	2.048.471.779
	B.3 Gedung dan Bangunan	2.947.715.000	-	-	2.947.715.000
	B.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	B.5 Aset Tetap Lainnya	927.109	-	-	927.109
	B.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	B.7 Akumulasi Penyusutan	(2.619.655.833)	-	-	(2.619.655.833)
C	ASET LAINNYA	618.000	-	-	618.000
	C.1 Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
	C.2 Aset Lain-lain	960.308.153	-	-	960.308.153
	C.3 Akumulasi Penyusutan	(959.690.153)	-	-	(959.690.153)
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	11.346.629.113	-	-	11.346.629.113
E	Ekstrakomptabel	4.922.000	-	-	4.922.000
	E.1 Ekstrakomptabel	23.054.020	-	-	23.054.020
	E.2 Akumulasi Penyusutan	(18.132.020)	-	-	(18.132.020)
F	TOTAL (D+E)	11.351.551.113	-	-	11.351.551.113

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
Keuangan	Barang

II. PERIODE			
Jun	30	20	26

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode	0050130000402318000KD
2. Nama	Pengadilan Agama Tanjungpandan Jl. Anwar No. 5 Tanjungpandan Telp. 071921309 Fax. 07199223119 Belitung - Bangka Belitung 33412

IV. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	Belanja Modal	Belanja Non Modal			Total
			Belanja Barang	Belanja Bantuan	Belanja Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
A	ASET LANCAR	-	-	-	-	-
A.1	Persediaan	-	-	-	-	-
B	ASET TETAP	17.354.000	-	-	-	17.354.000
B.1	Tanah	-	-	-	-	-
B.2	Peralatan dan Mesin	17.354.000	-	-	-	17.354.000
B.3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
B.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-
B.5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
B.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
C	ASET LAINNYA	-	-	-	-	-
C.1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-
C.2	Aset Lain-lain	-	-	-	-	-
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	17.354.000	-	-	-	17.354.000
E	Ekstrakomptabel	2.645.998	1.440.000	-	-	4.085.998
F	TOTAL (D+E)	19.999.998	1.440.000	-	-	21.439.998

V. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode semester I tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp 616.968 (enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan penggunaan saranda dan prasarana sesuai dengan tusunya sebesar Rp 616.968 (enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah)

b.

VI. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo awal periode semester I tahun anggaran 2026 terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LKBP dan LKKL sebesar Rp0 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a.

b.

Terdapat koreksi audit dari BPK sebesar Rp0 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a.

b.

Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah BMN berupa aset tetap selama periode berjalan (pembeliandan pengembangan BMN) dengan total realisasi belanja modal sebesar Rp0 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a.

b.

**LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PADA TINGKAT SATUAN KERJA**

**LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL**

I. TANDA TANGAN	
	
Keuangan	Barang

II. PERIODE			
Jun	30	20	26

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode	0	0	5	0	1	3	0	0	0	4	0	2	3	1	8	0	0	0	K	D
2. Nama	Pengadilan Agama Tanjungpandan Jl. Anwar No. 5 Tanjungpandan Telp. 071921309 Fax. 07199223119 Belitung - Bangka Belitung 33412																			

IV. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN

No.	No. SP2D	Tgl SP2D	JNS BLJ	URAIAN JENIS BLJ	RUPIAH SPM	TOT RUPIAH SPPA	SELISIH
1	261070000002330	07/04/2026	Belanja Modal	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.354.000	17.354.000	-
2	261070000002330	07/04/2026	Belanja Modal	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2.645.998	2.645.998	-
3							

*) apabila tidak mencukupi dapat ditambahkan pada lembar tersendiri

V. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUK BMN

No.	No. SP2D	Tgl SP2D	JNS BLJ	URAIAN JENIS BLJ	RUPIAH SPM	TOT RUPIAH SPPA	SELISIH
1	261070000004545	25/06/2026	Belanja Barang	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.440.000	1.440.000	-
2							
3							

*) apabila tidak mencukupi dapat ditambahkan pada lembar tersendiri

VI. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM MEMBENTUK BMN

No.	No. SP2D	Tgl SP2D	JNS BLJ	URAIAN JENIS BLJ	RUPIAH SPM	TOT RUPIAH SPPA	SELISIH
1							
2							
3							

*) apabila tidak mencukupi dapat ditambahkan pada lembar tersendiri



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Jln. Anwar No. 5 Kel. Pangkallalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung 33412
Telp. (0719) 21309 www.pa-tanjungpandan.go.id, pa.tanjungpandan.go.id@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN
(STOCK OPNAME)

Nomor: 154/SEK.PA.W28-A3/PL1.2.5/VI/2026

Nama Satker : Pengadilan Agama Tanjungpandan
Kode Satker : 005013000402318000KD
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
UAPPB-E1 : Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Pengadilan Agama Tanjungpandan, kami yang bertanda tangan di bawah ini tim pelaksana pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname):

1. Nama : Andri Zulian Putra, S.H. (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan)
NIP : 198601152011011010
Jabatan : Ketua
2. Nama : Desi Amalia, S.E. (Penata Layanan Operasional/Operator GL dan Pelaporan).
NIP : 199612252022032010
Jabatan : Sekretaris/Anggota
3. Nama : Ahmad Sobirin, S.T. (Teknisi Sarana dan Prasarana/Operator Aset dan Persediaan).
NIP : 199705022025061013
Jabatan : Anggota

Menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) Semester I tahun 2026 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname).

Demikian berita acara pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) ini dibuat untuk bahan penyusunan laporan keuangan Semester I tahun 2026 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim pelaksana pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname):

1. Nama : Andri Zulian Putra, S.H.
2. Nama : Desi Amalia, S.E.
3. Nama : Ahmad Sobirin, S.T.

.....
.....
.....

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Tanjungpandan



Hadi Siswanto, S.Kom., M.H.
NIP. 198003292009121001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Jln. Anwar No. 5 Kel. Pangkallalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung 33412
Telp. (0719) 21309 www.pa-tanjungpandan.go.id, pa.tanjungpandan.go.id@gmail.com

HASIL PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN
(STOCK OPNAME)

Nomor: 154/SEK.PA.W28-A3/PL1.2.5/VI/2026

Nama Satker : Pengadilan Agama Tanjungpandan
Kode Satker : 005013000402318000KD
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
UAPPB-E1 : Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

No	Nama Barang	Kode Barang	Kuantitas Barang		Selisih	Kondisi		
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Buruk	Usang
1	Pena Kenko	1010301001000005	1	1	0	✓	-	-
2	Pensil Grebel	1010301001000029	1	1	0	✓	-	-
3	Spidol Biasa	1010301001000043	19	19	0	✓	-	-
4	Pena Sign Pro	1010301001000044	2	2	0	✓	-	-
5	Spidol Permanent	1010301001000045	1	1	0	✓	-	-
6	Pena Pilot G-2	1010301001000046	1	1	0	✓	-	-
7	Tinta Stempel	1010301002000001	8	8	0	✓	-	-
8	Binder Clips No. 105	1010301003000032	1	1	0	✓	-	-
9	Binder Clips Warna	1010301003000034	3	3	0	✓	-	-
10	Binder Clips No. 300	1010301003000036	1	1	0	✓	-	-
11	Penghapus	1010301004000001	47	47	0	✓	-	-
12	Correction Tape	1010301004000017	8	8	0	✓	-	-
13	Correction Fluid Joyco	1010301004000018	11	11	0	✓	-	-
14	Buku Ekspedisi	1010301005000001	10	10	0	✓	-	-
15	Buku 1 2 Folio	1010301005000002	1	1	0	✓	-	-
16	Buku Quarto	1010301005000003	5	5	0	✓	-	-
17	Buku Folio 2	1010301005000004	5	5	0	✓	-	-
18	Buku Kwitansi	1010301005000016	2	2	0	✓	-	-
19	Nota	1010301005000019	5	5	0	✓	-	-
20	Map Plastik Snelhecter	1010301006000001	18	18	0	✓	-	-
21	Stopmap Folio Snelhecter	1010301006000004	45	45	0	✓	-	-
22	Map Ordner Benex	1010301006000018	18	18	0	✓	-	-
23	Map Kertas Batik	1010301006000021	15	15	0	✓	-	-
24	Stop Map Biola (Pack)	1010301006000027	2	2	0	✓	-	-
25	Cutter Ken L.500	1010301008000001	9	9	0	✓	-	-
26	Gunting	1010301008000002	13	13	0	✓	-	-
27	Lem Kertas	1010301010000002	12	12	0	✓	-	-
28	Double Tape	1010301010000017	8	8	0	✓	-	-
29	Double Tape 3 M	1010301010000019	6	6	0	✓	-	-

30	Lakban Sedang	1010301010000022	4	4	0	✓	-	-
31	Isolasi bening	1010301010000024	6	6	0	✓	-	-
32	Lakban Bening	1010301010000025	5	5	0	✓	-	-
33	Stepler	1010301012000001	4	4	0	✓	-	-
34	Isi Staples No. 10	1010301013000003	28	28	0	✓	-	-
35	Stabilo	1010301999000000	10	10	0	✓	-	-
36	Removermax	1010301999000003	4	4	0	✓	-	-
37	Index & Mask (Sign In)	1010301999000011	11	11	0	✓	-	-
38	Post It Colour	1010301999000020	17	17	0	✓	-	-
39	Box File Bindex Jumbo	1010301999000024	6	6	0	✓	-	-
40	Push Pin Jarum	1010301999000028	2	2	0	✓	-	-
41	Papan Ujian	1010301999000029	5	5	0	✓	-	-
42	Post it Besar	1010301999000030	2	2	0	✓	-	-
43	HVS F4 70 GR	1010302001000000	5	5	0	✓	-	-
44	HVS A4 70 GR	1010302001000003	20	20	0	✓	-	-
45	Kertas Sticker A4	1010302002000018	1	1	0	✓	-	-
46	Kertas Poto Glossy	1010302002000020	8	8	0	✓	-	-
47	Tisu	1010302002000021	13	13	0	✓	-	-
48	Silky Photo Paper	1010302002000022	1	1	0	✓	-	-
49	Kertas Tick	1010302003000002	17	17	0	✓	-	-
50	Kertas Buffalo	1010302003000005	3	3	0	✓	-	-
51	Tinta Data Print Hitam	1010304004000000	5	5	0	✓	-	-
52	Tinta Data Print Warna	1010304004000001	7	7	0	✓	-	-
53	Canon Catridge 811 Color	1010304004000011	1	1	0	✓	-	-
54	Tinta 790 Black	1010304004000014	2	2	0	✓	-	-
55	Tinta 790 Colour	1010304004000016	6	6	0	✓	-	-
56	Catridge 745 Black	1010304004000017	1	1	0	✓	-	-
57	Catridge 746 Colour	1010304004000018	1	1	0	✓	-	-
58	Flash Disk Toshiba 32 GB	1010304006000001	3	3	0	✓	-	-
59	Flash Disk Toshiba 16 GB	1010304006000002	3	3	0	✓	-	-
60	Mouse RBT	1010304010000002	2	2	0	✓	-	-
61	Sapu Lantai	1010305001000001	5	5	0	✓	-	-
62	Sikat Lantai Gagang	1010305001000003	2	2	0	✓	-	-
63	Kemoceng	1010305001000009	1	1	0	✓	-	-
64	Pel Gagang	1010305002000004	3	3	0	✓	-	-
65	Lap Tangan Gantung	1010305002000026	8	8	0	✓	-	-
66	Ember Besar	1010305003000001	3	3	0	✓	-	-
67	Keset Kain	1010305004000001	1	1	0	✓	-	-
68	Pengki	1010305004000003	3	3	0	✓	-	-
69	Plastik Sampah	1010305004000008	4	4	0	✓	-	-
70	Filter Air	1010305005000010	2	2	0	✓	-	-
71	Tali	1010305006000006	3	3	0	✓	-	-
72	Sunlight	1010305008000001	1	1	0	✓	-	-
73	Yuri Hand Shop	1010305008000007	12	12	0	✓	-	-

74	Pembersih Kaca Refill	1010305008000008	6	6	0	✓	-	-
75	Porstex	1010305008000011	4	4	0	✓	-	-
76	Mama Lemon	1010305008000013	20	20	0	✓	-	-
77	Yuri Hand Soap Refill	1010305008000023	3	3	0	✓	-	-
78	So Klin Pembersih Lantai	1010305008000024	8	8	0	✓	-	-
79	Cling Kaca Refill	1010305008000033	10	10	0	✓	-	-
80	Super Pell 770 ml	1010305008000035	5	5	0	✓	-	-
81	Yuri Porstex	1010305008000039	1	1	0	✓	-	-
82	Sendok Makan	1010305009000006	1	1	0	✓	-	-
83	Tutup Gelas Set	1010305009000010	1	1	0	✓	-	-
84	Gelas Kecil	1010305009000022	2	2	0	✓	-	-
85	Gelas Kertas	1010305009000034	2	2	0	✓	-	-
86	Kapur Barus Swallow Colour Ball	1010305012000004	3	3	0	✓	-	-
87	Glade 350 MI Spafresh	1010305012000006	1	1	0	✓	-	-
88	Glade 350 MI Aerosol	1010305012000007	8	8	0	✓	-	-
89	Glade Matic Refill	1010305012000009	3	3	0	✓	-	-
90	Stela Daily Fresh	1010305012000012	6	6	0	✓	-	-
91	Stella All In One	1010305012000013	3	3	0	✓	-	-
92	Stela Matic Refill	1010305012000017	7	7	0	✓	-	-
93	Glade One For All	1010305012000023	7	7	0	✓	-	-
94	Kamper Swallow Jumbo Ball	1010305012000029	4	4	0	✓	-	-
95	Swallow Toilet Ball	1010305012000036	5	5	0	✓	-	-
96	K-24 Dahlia	1010305012000037	5	5	0	✓	-	-
97	Nomos Aerosol	1010305012000041	8	8	0	✓	-	-
98	Kapur Barus	1010305012000043	3	3	0	✓	-	-
99	Label Tanda Sedang	1010305999000034	8	8	0	✓	-	-
100	Gantungan Kamar Mandi	1010305999000040	1	1	0	✓	-	-
101	Cermin	1010305999000083	2	2	0	✓	-	-
102	Kabel Listrik	1010306001000003	2	2	0	✓	-	-
103	Kabel Eterna	1010306001000004	1	1	0	✓	-	-
104	Kabel Dack	1010306001000007	2	2	0	✓	-	-
105	Lampu Philip LED	1010306002000004	9	9	0	✓		
106	Vitting Lampu	1010306008000001	3	3	0	✓		
107	Vitting Gantung Lampu	1010306008000002	2	2	0	✓		
108	Batere Alkaline AAA	1010306010000005	11	11	0	✓		
109	Baterai Alkaline AA Isi 6	1010306010000006	6	6	0	✓		
110	Terminal Listrik 4 Lubang	1010306999000014	2	2	0	✓		
111	Klem Kabel	1010306999000015	1	1	0	✓		
112	Lambang Burung Garuda	1010307006000003	4	4	0	✓		
113	Name Tag	1010307006000005	50	50	0	✓		
114	Materai 10.000	1010309001000001	60	60	0	✓		
115	Alas Meja Sidang	1010309999000010	2	2	0	✓		
116	Cermin Besar	1010309999000019	1	1	0	✓		

117	Sandal	1010309999000020	3	3	0	✓		
118	Sarung Mic	1010310003000002	9	9	0	✓		
119	Keset	1010310999000007	1	1	0	✓		

Tim pelaksana pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname):

1. Nama : Andri Zulian Putra, S.H.

2. Nama : Desi Amalia, S.E.

3. Nama : Ahmad Sobirin, S.T.

.....
.....
.....

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Tanjungpandan

.....

Hadi Siswanto, S.Kom., M.H.
NIP. 198003292009121001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2026
TAHUN ANGGARAN 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 402318 PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN

Tgl.Data : 21/07/26 12:34 PM
Tgl.Cetak : 21/07/26 5:58 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	15,575,450
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	4,100,910
131111	Tanah	8,951,568,000
132111	Peralatan dan Mesin	2,065,825,779
133111	Gedung dan Bangunan	2,947,715,000
135121	Aset Tetap Lainnya	927,109
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,915,438,829)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(813,977,720)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	960,308,153
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(960,308,153)
J U M L A H		11,256,295,699

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2026(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 402318 PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN

Tanggal : 21/07/26 5:59 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	13,142,608
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,842,450
131111	Tanah	8,951,568,000
132111	Peralatan dan Mesin	2,048,471,779
133111	Gedung dan Bangunan	2,947,715,000
135121	Aset Tetap Lainnya	927,109
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,846,676,786)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(772,979,047)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	960,308,153
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(959,690,153)
J U M L A H		11,346,629,113

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 402318 PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM
Tanggal : 21/07/26 6:01 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	664,700
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	85,000
1010301003	Penjepit Kertas	177,000
1010301004	Penghapus/Korektor	194,750
1010301005	Buku Tulis	451,500
1010301006	Ordner Dan Map	918,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	429,500
1010301010	Alat Perekat	481,500
1010301012	Staples	40,000
1010301013	Isi Staples	56,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	778,000
1010302001	Kertas HVS	1,300,000
1010302002	Berbagai Kertas	812,500
1010302003	Kertas Cover	907,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	2,650,000
1010304006	USB/Flash Disk	570,000
1010304010	Mouse	140,000
1010306001	Kabel Listrik	554,000
1010306002	Lampu Listrik	573,000
1010306008	Vitting	53,000
1010306010	Batu Baterai	317,000
1010306999	Alat Listrik Lainnya	38,000
1010307006	Atribut	2,250,000
1010309001	Meterai	600,000
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	407,000
1010310003	Persediaan Berupa Alat Penunjang Studio Dan Komunikasi	90,000
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	38,000
Jumlah Barang Konsumsi		15,575,450
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	330,000
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	260,000
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	120,000
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	234,910
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	32,000
1010305006	Alat Pengikat	15,000
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	859,000
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	248,000
1010305012	Pengharum Ruangan	1,427,000
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	575,000
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		4,100,910
TOTAL		19,676,360

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 402318 PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 6:02 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		7,367	8,951,568,000	0	0	0	0	7,367	8,951,568,000
20101	TANAH PERSIL	-	7,367	8,951,568,000	0	0	0	0	7,367	8,951,568,000
132111	Peralatan dan Mesin		198	2,048,471,779	8	17,354,000	0	0	206	2,065,825,779
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	12	510,332,000	0	0	0	0	12	510,332,000
30501	ALAT KANTOR	-	26	149,000,500	0	0	0	0	26	149,000,500
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	88	445,973,289	8	17,354,000	0	0	96	463,327,289
30601	ALAT STUDIO	-	3	25,850,000	0	0	0	0	3	25,850,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	8	90,770,000	0	0	0	0	8	90,770,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	43	536,429,400	0	0	0	0	43	536,429,400
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	18	290,116,590	0	0	0	0	18	290,116,590
133111	Gedung dan Bangunan		2	2,947,715,000	0	0	0	0	2	2,947,715,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	1	2,750,646,000	0	0	0	0	1	2,750,646,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	1	197,069,000	0	0	0	0	1	197,069,000
135121	Aset Tetap Lainnya		12	927,109	0	0	0	0	12	927,109
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	12	927,109	0	0	0	0	12	927,109
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		495	960,308,153	0	0	0	0	495	960,308,153
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	2	2,210,000	0	0	0	0	2	2,210,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	6	1,999,635	0	0	0	0	6	1,999,635
30501	ALAT KANTOR	-	104	142,968,561	0	0	0	0	104	142,968,561
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	288	228,183,691	0	0	0	0	288	228,183,691
30601	ALAT STUDIO	-	15	41,793,000	0	0	0	0	15	41,793,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	6	22,079,816	0	0	0	0	6	22,079,816
31001	KOMPUTER UNIT	-	34	419,048,950	0	0	0	0	34	419,048,950
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	39	101,879,500	0	0	0	0	39	101,879,500
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	145,000	0	0	0	0	1	145,000
TOTAL				14,908,990,041		17,354,000		0		14,926,344,041

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 402318 PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 6:03 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2026								
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN					NILAI BUKU	
					SALDO AWAL		MUTASI PENYUSUTAN		TOTAL		
1	2	3	4	5	6		7		8=6+7	9=5-8	
132111	Peralatan dan Mesin		22	11,905,010	13	6,731,996		4	2,645,998	31	15,991,008
30501	ALAT KANTOR	-	0	0	4	2,645,998		0	0	4	2,645,998
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	22	11,905,010	9	4,085,998		4	2,645,998	27	13,345,010
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		163	11,149,010	0	0		0	0	163	11,149,010
30501	ALAT KANTOR	-	13	1,173,500	0	0		0	0	13	1,173,500
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	144	9,375,510	0	0		0	0	144	9,375,510
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	6	600,000	0	0		0	0	6	600,000
TOTAL				23,054,020		6,731,996			2,645,998		27,140,018

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 402318 PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 6:04 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		7,367	8,951,568,000	0	0	0	0	7,367	8,951,568,000
20101	TANAH PERSIL	-	7,367	8,951,568,000	0	0	0	0	7,367	8,951,568,000
132111	Peralatan dan Mesin		220	2,060,376,789	21	24,085,996	4	2,645,998	237	2,081,816,787
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	12	510,332,000	0	0	0	0	12	510,332,000
30501	ALAT KANTOR	-	26	149,000,500	4	2,645,998	0	0	30	151,646,498
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	110	457,878,299	17	21,439,998	4	2,645,998	123	476,672,299
30601	ALAT STUDIO	-	3	25,850,000	0	0	0	0	3	25,850,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	8	90,770,000	0	0	0	0	8	90,770,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	43	536,429,400	0	0	0	0	43	536,429,400
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	18	290,116,590	0	0	0	0	18	290,116,590
133111	Gedung dan Bangunan		2	2,947,715,000	0	0	0	0	2	2,947,715,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	1	2,750,646,000	0	0	0	0	1	2,750,646,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	1	197,069,000	0	0	0	0	1	197,069,000
135121	Aset Tetap Lainnya		12	927,109	0	0	0	0	12	927,109
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	12	927,109	0	0	0	0	12	927,109
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		658	971,457,163	0	0	0	0	658	971,457,163
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	2	2,210,000	0	0	0	0	2	2,210,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	6	1,999,635	0	0	0	0	6	1,999,635
30501	ALAT KANTOR	-	117	144,142,061	0	0	0	0	117	144,142,061
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	432	237,559,201	0	0	0	0	432	237,559,201
30601	ALAT STUDIO	-	15	41,793,000	0	0	0	0	15	41,793,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	12	22,679,816	0	0	0	0	12	22,679,816
31001	KOMPUTER UNIT	-	34	419,048,950	0	0	0	0	34	419,048,950
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	39	101,879,500	0	0	0	0	39	101,879,500
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	145,000	0	0	0	0	1	145,000
TOTAL				14,932,044,061		24,085,996		2,645,998		14,953,484,059

